

Implementasi United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC) dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perang di Yaman

Etha Pebrianti Setyaningrum¹, Ahmad Mubarak Munir², Kinanti Rizsa Sabilla³, Syaiful Anam⁴

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ethapebrianti@gmail.com

ABSTRACT

One of the armed conflicts that led to war occurred in Yemen, which caused many children to become victims. It is noted that many children have their rights to survival neglected. The analysis used in this research is the international regime theory which will explain how an international regime, namely the UNCRC, will be an answer in providing fulfillment of children's right. This research also uses the concept of the 1989 Convention on the Rights of the Child. The results of this study show that Yemen has attempted to provide the fulfillment of children's right in accordance with the UNCRC that they have ratified and in fulfilling children's rights, Yemen is also assisted by several international organizations under the auspices of the UN. However, in implementing the UNCRC there are several obstacle that cannot be avoided.

Keywords: Yemen War, Child Rights, UNCRC

ABSTRAK

Salah satu konflik bersenjata yang berujung pada perang terjadi di Yaman, Hal ini yang menyebabkan banyaknya anak menjadi korban. Tercatat bahwa banyak anak-anak yang hak-hak atas kelangsungan hidupnya terabaikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori rezim internasional yang nantinya akan menjelaskan mengenai bagaimana sebuah rezim internasional yakni UNCRC akan menjadi sebuah jawaban dalam memberikan pemenuhan terhadap hak anak. Pada penelitian ini juga menggunakan konsep konvensi hak anak 1989. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yaman telah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak sesuai dengan UNCRC yang telah mereka ratifikasi dan dalam memenuhi hak anak, Yaman juga dibantu oleh beberapa organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Namun, dalam pengimplementasian UNCRC terdapat beberapa hambatan yang tidak dapat dihindari.

Kata Kunci: Perang Yaman, Hak Anak, UNCRC

PENDAHULUAN

Perang atau konflik bersenjata merupakan suatu konflik tertinggi antar manusia, dalam studi hubungan internasional perang secara tradisional diartikan sebagai penggunaan kekerasan terorganisir oleh unit-unit politik yang saling bertentangan dengan tujuan mereka masing-masing (Widayanti et al., 2019). Adanya perang yang belum kunjung usai, menimbulkan banyak korban dari warga sipil yang terus meningkat terkhusus anak-anak. Anak-anak semestinya

memiliki hak tumbuh kembang yang baik, namun ketika perang mulai melanda maka seluruh hak mereka mulai ditelantarkan bahkan dilanggar tanpa ada rasa belas kasihan.

Salah satu konflik berkepanjangan yang tergolong kedalam perang saudara, bermula di Yaman pada masa kepemimpinan presiden pertamanya yaitu Ali Abdullah Saleh. Konflik bermula pada tahun 2011, perang saudara ini telah dipengaruhi oleh salah satu fenomena Arab Spring yang merebak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Penyebab peristiwa ini terjadi disebabkan kondisi situasi politik yang sangat lemah, masalah kesejangan sosial serta merebaknya kasus kelaparan yang tidak teratasi dengan baik. Beberapa permasalahan ini yang kemudian menyebabkan rakyat melakukan aksi demonstrasi di ibu kota Yaman yakni Sana'a dan menyebar ke daerah lainnya (Rahman & Munabari, 2017).

Pada Januari 2011, tercatat terjadi demonstrasi terbesar selama Presiden Ali Abdullah Saleh menjabat. Masyarakat mengusir presiden untuk pergi dari istana kepresidenan dan melepas jabatannya. Demonstrasi semakin kecewa terhadap Ali Abdullah Saleh yang masih berusaha untuk mempertahankan jabatannya serta menginginkan jabatan kembali hingga dua tahun membuat demonstrasi semakin tidak terima. Titik demo bertambah hingga ke daerah Aden, Taiz, Mukalla, Hudaidah dan Saa'ada sehingga kondisi negara semakin tidak terkendali. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengumumkan kondisi bahaya negara dan selama masa darurat ini pemerintah telah mengupayakan upaya mediasi antara pemerintah dan oposisi. Namun, upaya mediasi ini dinyatakan gagal dikarenakan Ali Abdullah Saleh terus membatalkan upaya mediasi

Ditengah situasi nasional yang semakin hari semakin memburuk, membuat wakil presiden Yaman yakni Abdrabbuh Mansur Hadi pada Juni 2011, mengambil alih tugas sebagai presiden. Saat kepemimpinan Abdrabbuh Mansur Hadi, terjadi sebuah perlawanan dari kelompok non-negara yakni suku Houthi. Kelompok ini menganut mazhab Syiah yang merupakan sebuah kelompok minoritas, Houthi merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dikarenakan mereka sebuah kelompok minoritas yang menganut dan mempercayai mazhab Syiah. Melihat kondisi yang seperti itu, menimbulkan tuntutan kepada pemerintahan Mansur Hadi untuk segera memberikan posisi di pemerintahan kepada Houthi dengan mendeklarasikan landasan reformasi. Pada 2014, kelompok Houthi mulai memberontak dan berupaya untuk mengambil alih ibu kota Sana'a dan Yaman bagian Utara (AP News, 2011).

Disebabkan kondisi yang semakin runyam karena tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pemerintah, pada akhirnya perang yang tidak bisa dihindari terjadi antara kelompok Houthi dengan pasukan dari pemerintah Yaman. Serangan demi serangan terus dilakukan hingga ke pusat kota hingga merusak gedung bangunan serta menimbulkan banyaknya korban jiwa membuat pertempuran semakin memanas bagi kedua belah pihak. Ditengah kekacauan kondisi pemerintahan, Mansur Hadi meminta bantuan dari Peninsula-Gulf Cooperation Council (GCC) yang merupakan negara-negara dewan kerjasama teluk untuk mengembalikan kekuasaannya sebagai presiden sah Yaman. Pada Maret 2015, telah dilakukan serangan pada kelompok Houthi yang merupakan hasil kesepakatan dari 6 negara anggota dewan kerjasama teluk (Rahman & Munabari, 2017).

Selama operasi serangan dilancarkan banyak sekali merenggut korban jiwa diantara masyarakat, terkhusus kaum wanita, orang tua dan anak-anak. Perang Yaman menyebabkan lebih dari 11.000 anak telah terbunuh hingga cacat (UNICEF, 2022), sebanyak 11 juta anak-anak membutuhkan perlindungan kemanusiaan (UNICEF, 2022). Anak-anak yang terjebak pada kondisi perang Yaman telah menjadi perhatian serius bagi PBB, United Nations Convention on the Rights of The Child (UNCRC) merupakan sebuah konvensi internasional yang berada di bawah naungan United Nations Commission on Human Right (OHCHR) dan PBB. Secara khusus, UNCRC merupakan sebuah konvensi mengenai hak asasi manusia secara internasional yang membahas terkait dengan hak-hak anak dan bertugas untuk mengatur segala bentuk penghormatan, jaminan, pengakuan, pemenuhan serta perlindungan. UNCRC mengharuskan negara yang telah meratifikasi perjanjian ini agar mengambil langkah-langkah tepat yang sesuai dalam konvensi ini tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ataupun kondisi sosial lainnya. Kemudian, sebagaimana yang telah ditetapkan pada deklarasi hak-hak anak bahwa anak-anak sangat memerlukan perlindungan, pemenuhan, dan pengasuhan khusus sejak anak dilahirkan (OHCHR, 2002).

UNCRC telah diratifikasi oleh 193 negara di dunia dan Yaman merupakan salah satu negara yang juga meratifikasi konvensi pada 1 Mei 1991 (United Nations, 1989). Pada kasus Yaman, sesuai dengan UNCRC maka anak-anak harus mendapatkan perlindungan serta pemenuhan haknya terutama korban perang. Mereka berhak atas hak-hak seperti anak-anak lainnya, melihat kondisi Yaman banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan haknya. Anak-anak telah dikategorikan sebagai kelompok yang paling rentan, anak-anak masih membutuhkan perhatian, empati serta perlindungan dari orang dewasa karena mereka tidak mampu membela diri. Berdasarkan dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Yaman pada 01 Mei 1991, Yaman berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada anak dalam keadaan perang. Negara wajib untuk memastikan serta mengambil langkah dan upaya yang tepat guna melindungi anak-anak dari serangan berbahaya (Hidayat, 2022)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Jenis penelitian ini memperoleh hasil yang tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantifikasi lainnya. Pada penelitian kualitatif, dilakukan dengan cara meneliti serta mengamati sejarah, kehidupan masyarakat, tingkah laku negara, gerakan sosial, hingga mengamati pola permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari hasil pengamatan mendalam (Basrowi & Suwandi, 2008).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORI REZIM INTERNASIONAL

Rezim internasional ini, biasanya hadir dari sebuah organisasi internasional, kerjasama, kesepakatan maupun perjanjian internasional yang dimana terdapat komponen-komponen utama. Adapun beberapa komponen yang dimaksud yaitu terdapat prinsip, norma, peraturan hingga pembuatan kebijakan atau keputusan. Dengan adanya komponen ini, dapat menjelaskan fungsi serta peran dari rezim internasional itu sendiri. Adapun peran dari rezim

internasional sebagai koordinator terhadap perilaku negara mengenai sebuah isu-isu tertentu, kemudian turut memastikan agar setiap negara memperoleh hasil yang maksimal dalam menangani sebuah isu dan tidak lupa juga untuk mengingatkan kembali aktor-aktor dalam hubungan internasional mengenai prinsip, norma serta aturan-aturan yang telah disepakati bersama (Rizki et al., 2022).

Kapasitas dari rezim internasional tentu berkaitan dengan power of distribution serta grand regulations yang selama ini sudah berjalan. Jika terdapat permasalahan internasional maupun non internasional yang semakin lama semakin berkembang hingga kompleks maka tentu rezim internasional atau dalam negeri harus dapat menyesuaikan dengan seluruh sumber daya yang ada guna dapat mengimbangi dan menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Rezim internasional menyatakan bahwa, negara harus bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Hasil dari sebuah rezim adalah seperangkat aturan atau tindakan dari negara yang dikeluarkan dalam menyikapi sebuah isu tertentu (Gabiella, 2019). Rezim tidak berkuasa atas negara melainkan tetap patuh terhadap kehendak domestik masing-masing negara (Rosyidin, 2018).

Guna menelaah penelitian penulis mengenai pemenuhan hak-hak anak korban perang di Yaman, maka teori rezim internasional menjadi salah satu alternatif yang baik dalam memahami problematika yang dihadapi oleh Yaman. Rezim internasional yang digunakan sesuai dengan penelitian ini yaitu United Nations Convention on The Right of The Child (UNCRC) yang berada di bawah naungan PBB ini sebagai sebuah aturan maupun norma yang telah diratifikasi oleh Yaman pada tahun 1991, setelah meratifikasi konvensi ini negara setuju untuk mengikuti prinsip, norma, upaya hingga peraturan-peraturan dalam menyelesaikan isu anak di Yaman.

KONSEP KONVENSI HAK ANAK 1989

Konvensi hak anak merupakan, salah satu instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip secara universal yang memiliki norma hukum mengenai kedudukan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Latar belakang dari konvensi ini, disebabkan adanya keinginan terkait penegakan hak seluruh anak di dunia. Dapat dilihat bahwa banyak anak-anak telah menjadi korban perang hingga eksploitasi. Konvensi hak anak dapat diadopsi oleh seluruh negara di dunia, yakni dengan cara memasukkan konvensi ini menjadi sebuah bagian dalam hukum nasional negara.

Berdasarkan isi dari konvensi hak anak terdapat empat kategori yakni: Pertama, kategori yang berdasarkan pada konvensi induk hak asasi manusia, bermaksud bahwa konvensi hak-hak anak tentu mengandung hak sipil, politik, ekonomi serta budaya. Kedua, dilihat dari sisi yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi konvensi ini yaitu negara. Ketiga, sesuai dengan pembagian berdasarkan cakupan yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak mendapat perlindungan (protection) serta yang terakhir hak untuk berpartisipasi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat (participation) (Eddyono, 2007). Negara yang telah meratifikasi konvensi maka mereka telah berjanji untuk melindungi seluruh anak. Dalam konvensi, telah

dinyatakan bahwa anak-anak harus dipastikan untuk bertumbuh kembang dengan baik, anak-anak harus sekolah, dilindungi, didengar seluruh pendapat dan keinginannya serta mereka harus diperlakukan secara adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK ANAK KORBAN PERANG YAMAN

Anak-anak di Yaman telah menghadapi sebuah kenyataan bahwa kondisi kehidupan mereka sangat mengerikan dikarenakan perang Yaman yang belum menunjukkan titik terang antara pihak-pihak yang berkonflik. Anak-anak terpaksa untuk berjuang agar dapat bertahan hidup di tengah kacaunya kondisi negara. Anak-anak sebagai kaum yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri tentu mendapatkan banyak pelanggaran terhadap hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi. Terdapat jutaan anak yang menderita akibat dari perang yang tidak mereka buat, adapun pelanggaran yang terjadi pada anak-anak di Yaman seperti buruknya layanan kesehatan, kerawanan pangan dan malnutrisi, sanitasi yang buruk, sulitnya akses pendidikan, kekerasan yang merajalela dan banyaknya tentara anak (UNICEF, 2023a).

Telah dinyatakan dengan jelas dalam konvensi hak anak 1989 bahwa, anak-anak yang tejobak dalam kondisi perang harus dilindungi dan dipenuhi haknya. Namun, hak anak mulai diabaikan dan hal ini bertolak belakang dengan konvensi yang menyatakan bahwa akan memmemberikan perlindungan sepenuhnya pada anak. Pelanggaran yang terjadi di Yaman dapat dilihat dari tidak terpenuhinya hak anak pada cakupan konvensi hak anak 1989. Adapun pelanggaran tersebut terbagi menjadi 3 aspek yakni, hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*) dan hak untuk mendapatkan perlindungan serta berpartisipasi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat (*protection and participation*). Yaman seharusnya melindungi dan memenuhi seluruh hak-hak anak yang selaras dengan kebijakan, norma maupun peraturan yang telah diratifikasi.

A) Aspek Survival

Salah satu aspek pada konvensi hak anak yaitu, kelangsungan hidup (*survival*). Pada kondisi perang, kelangsungan hidup anak tidak boleh terganggu melainkan harus mendapatkan perlindungan agar tidak mempengaruhi kehidupannya. Negara memiliki peran penting untuk memberikan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak (Metekohy, 2021). Namun, anak-anak di Yaman tidak mendapatkan kelangsungan hidup yang baik, minimnya fasilitas kesehatan, keterbatasan pangan dan buruknya sanitasi menjadi salah satu aspek yang dilanggar pada kondisi perang.

1. Minimnya Fasilitas Kesehatan yang Memadai

Sejak perang melanda Yaman pada 2011, fasilitas dan pekerja kesehatan menjadi sasaran utama. Pengeboman secara besar-besaran, serangan udara, pertempuran yang terjadi secara terus menerus dengan gencatan senjata menyebabkan terhambatnya akses ke layanan kesehatan dan meningkatkan tekanan pada fasilitas kesehatan yang masih berfungsi. Banyak warga hingga anak-anak menderita karena minimnya layanan kesehatan terutama di daerah Taiz Selatan dan Saa'da Utara (Astuti,

2019). Perang intens terjadi di daerah Saa'da hingga menyebabkan pekerja medis harus bersembunyi bahkan melarikan diri.

Menurut PBB lebih dari 1,4 juta masyarakat yaman telah mengungsi serta sebanyak 21 juta masyarakat Yaman terutama anak-anak sangat membutuhkan bantuan kesehatan dan kemanusiaan (United Nations, n.d.) Sekitar setengah dari fasilitas kesehatan di Yaman, tidak berfungsi dengan baik sementara banyak anak-anak yang menjadi korban perang membutuhkan layanan kesehatan yang memadai. Adanya kekurangan sumber daya manusia, peralatan kesehatan hingga minimnya persediaan obat-obatan, sangat menghambat upaya penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, dengan kondisi perang yang belum kunjung usai mengakibatkan tata kelola yang lemah dalam bidang kesehatan. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pasukan perang yang menyerang rumah sakit dan petugas kesehatan sehingga ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk penyediaan layanan kesehatan sangatlah kurang (World Bank, 2021).

2. Keterbatasan Pangan yang Berdampak pada Malnutrisi

Setengah populasi dari masyarakat Yaman sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, masyarakat tidak hanya merasakan sulitnya untuk mendapatkan makanan impor namun mereka juga sulit untuk mendapatkan bahan-bahan pangan secara lokal. Produksi pangan telah menurun secara drastis sejak terjadinya perang. Kerusakan infrastruktur telah menjadi sebab utama sulitnya akses dan produksi pangan menyebabkan kelangkaan dan kenaikan pada harga pangan dan ini juga tidak sesuai dengan hasil pendapatan ekonomi masyarakat (Andrini, 2021). Pada akhirnya menyebabkan banyak dari masyarakat Yaman, mengandalkan bantuan bahan pangan setiap harinya. Hal ini menyebabkan banyaknya anak-anak mengalami malnutrisi akut sebab sulitnya memperoleh bahan pangan terutama yang bergizi.

Sulitnya memperoleh makanan yang bergizi menyebabkan maraknya kondisi malnutrisi bagi anak-anak di Yaman. Sebanyak 2,3 juta anak balita di Yaman berada di ambang kelaparan per-akhir tahun 2021 (World Health Organization, 2021). Anak-anak di Yaman tidak pernah makan ikan maupun daging bahkan sebagian keluarga mereka banyak yang mengalami kekurangan gizi akut. Perang telah merampas kehidupan mereka hingga orang tua dari anak-anak banyak yang merasakan kesulitan dalam merawat anak sendiri. 85.000 anak usia di bawah 5 tahun tercatat telah meninggal dunia karena malnutrisi dan kelaparan akut yang menimpa mereka (Save The Children, 2021). Anak-anak yang meninggal dalam kondisi seperti ini sangat merasakan sakit yang luar biasa sebab fungsi organ vital mereka melambat.

3. Buruknya Sanitasi dan Air Bersih

Perang Yaman memiliki dampak kuat pada sulitnya sanitasi yang memadai, keadaan sanitasi yang buruk menyebabkan ribuan anak terjangkit penyakit menular. Rata-rata penyakit yang menimpa anak-anak di Yaman merupakan penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. PBB telah menyatakan, pada tahun 2018 banyak

masyarakat yang beralih menggunakan sumber air alternatif yang cenderung tidak aman. Kemudian, disekitar area perang terdapat banyak sekali tumpukan sampah serta limbah yang tidak teratasi dengan baik (Astuti, 2019). Hal ini kemudian menjadi sebuah ancaman besar yang akan menyebabkan penyebaran penyakit menular bagi anak-anak.

Kondisi kebersihan yang rendah, sumber air yang minim menyebabkan virus kolera berkembang di beberapa fasilitas sanitasi yang banyak digunakan secara massal oleh masyarakat Yaman (Shang & Zhang, 2022). Mewabahnya penyakit kolera mulai muncul pada tahun 2017, yang mana terdapat lebih dari 70.000 anak terinfeksi (UNICEF, 2017), 600 anak meninggal (UNICEF, 2017) dan jumlah kasus ini meningkat hingga 130.000 kasus dalam dua minggu pada tahun yang sama. (UNICEF, 2017). Kebutuhan akan sanitasi yang layak ketika konflik yang semakin tinggi, sangat dibutuhkan oleh anak-anak (UNICEF, 2017). Hal ini kemudian menambahkan penderitaan warga akibat kebutuhan primer yang tidak terpenuhi dengan baik dan anak-anak semakin menderita dengan adanya penyebaran penyakit.

B) Aspek Development

Hak untuk berkembang (*development*) pada anak harus diberikan serta dipenuhi dengan baik oleh negara. Anak-anak berhak untuk berkembang dengan optimal sesuai dengan hak-hak anak terkhusus pada bidang pendidikan. Mereka berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi, tingkat berpikir dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan umurnya (Fitriani, 2016). Namun, pada saat kondisi perang Yaman, anak-anak di Yaman sangat kesulitan guna memperoleh pendidikan yang layak. Salah satu bentuknya adalah hancurnya infrastruktur pendidikan.

Tercatat bahwa sejak perang dimulai pada Maret 2015, bidang pendidikan di Yaman mulai terpengaruh. Terdapat 1,8 juta anak putus sekolah dalam kurun waktu 2015-2016 (World Bank, 2016). Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengatakan bahwa lebih dari 1.100 sekolah telah ditutup karena adanya kerusakan langsung (World Bank, 2016). Tidak jarang pula, sekolah sering digunakan sebagai tempat menampung bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal hingga terkadang sekolah-sekolah darurat yang telah difasilitasi juga ikut diambil alih oleh kelompok bersenjata (ICRC, 2022). Pada beberapa kasus, sekolah di Yaman tetap berfungsi dengan kondisi penuh sesak, kekurangan guru yang berkualitas, kekurangan fasilitas kebersihan, perlengkapan dasar seperti meja, kursi dan buku pelajaran.

C) Aspek Protection and Participation

Hak untuk mendapat perlindungan dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (*protection and participation*) menyatakan bahwa, anak-anak pasti akan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, mereka juga berhak untuk berkumpul serta bermasyarakat dengan lingkungan sekitar mereka (Fitriani, 2016). Namun, dengan kondisi perang yang merugikan mereka, anak-anak tidak mendapatkan hal tersebut

dari negara maupun masyarakat. Eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi pada anak-anak masih sering terjadi pada saat perang.

Perekrutan anak-anak sebagai tentara perang tambahan dalam perang di Yaman merupakan salah satu kenyataan yang paling mengerikan sejak awal mula perang berlangsung. Dipaksa menjadi tentara perang dengan manipulatif akan finansial dan solidaritas suku (Nasser, 2023). Sejak awal mula perang berlangsung hingga saat ini, tentara anak terus bertambah setiap tahunnya, kekerasan dan perekrutan yang terjadi pada anak-anak seperti hal lumrah yang terjadi di Yaman. Kondisi perang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkungan buruk ini. Kekerasan pada anak dan penggunaan tentara anak dalam perang Yaman belum menunjukkan adanya penurunan jumlah dalam beberapa tahun terakhir.

UNICEF menyatakan bahwa sejak tahun 2015-2022 terdapat 3.995 kasus yang terverifikasi menggunakan tentara anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan (UNICEF, 2022). Perang antara Houthi dengan pemerintah Yaman, banyak sekali melibatkan anak-anak yang direkrut pada sebuah divisi yang dipimpin langsung oleh komando militer tertinggi yakni Jenderal Ali Muhsin al-Ahmar. Banyak dari tentara anak ini berada pada rentan usia 14-16 tahun. PBB juga memverifikasi bahwa pelanggaran berat terhadap anak-anak terjadi dalam bidang kesehatan, gizi buruk, sanitasi dan air bersih, pendidikan, kekerasan dan perekrutan tentara anak, yang terjadi pada masa perang Yaman (OCHA Services, 2023b).

UNCRC DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Convention on The Rights of The Child telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 20 November 1989 yang memiliki kekuatan memaksa dan memiliki arti bahwa, negara yang telah meratifikasi harus bekerja sesuai apa yang telah diputuskan bersama. Sudah selama 34 tahun sejak UNCRC diberlakukan, perjanjian ini merupakan perjanjian hak asasi manusia khususnya membahas mengenai anak secara internasional yang paling banyak telah diratifikasi oleh negara-negara di dunia (UNICEF, n.d.). UNCRC ini berisikan mengenai prinsip-prinsip yang bersifat universal dan terdapat norma, hukum serta kebijakan mengenai anak-anak, dengan ratifikasinya UNCRC maka dianggap mampu untuk mempengaruhi perilaku negara yang sesuai dengan definisi dari rezim internasional.

Pemenuhan hak anak berdasarkan UNCRC tidak hanya diadopsi oleh aktor negara saja akan tetapi, banyak aktor non negara dalam hal ini organisasi humanitarian internasional yang bergerak sesuai UNCRC. Mereka harus patuh terhadap norma yang telah diratifikasi, terdapat kebijakan hak anak yang diatur dalam UNCRC yang harus dipastikan bahwa setiap anak terlepas dari identitas mereka seperti agama, ras, suku dan budaya berhak untuk menikmati kehidupan mereka tanpa adanya gangguan, yang harus dipastikan dalam pemenuhan hak anak terdiri dari empat pilar utama yakni, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang dan hak untuk mendapatkan perlindungan serta berpartisipasi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi. Segala bentuk kebijakan maupun tindakan harus sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Perang saudara Yaman memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hidup anak hingga saat ini. Sebanyak 11 juta anak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan disebabkan hak-hak hidup mereka terabaikan (UNICEF, 2023). Dengan adanya UNCRC, Yaman sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi dan beberapa organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB juga turut membantu dalam upaya pemenuhan hak anak, pada setiap prosesnya mereka bekerja dan bergerak secara patuh sesuai norma dan kebijakan dari UNCRC. Seluruh pihak harus menyadari akan pentingnya dalam menjaga dan memberikan pemenuhan terhadap anak dalam kondisi perang sekalipun. Seluruh anak berhak untuk bertumbuh kembang dengan baik dan mewujudkan potensi mereka.

IMPLEMENTASI UNCRC TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK ANAK DI YAMAN

UNCRC sebagai sebuah rezim yang di dalamnya terdapat prinsip, norma, peraturan hingga turut memastikan agar setiap negara yang meratifikasi agar dapat menangani sebuah isu secara maksimal dan memastikan Yaman untuk menyelesaikan isu hak anak yang tidak kunjung usai hingga saat ini. Dengan pengimplementasian konvensi PBB mengenai hak-hak anak maka anak-anak harus mendapatkan haknya secara penuh tanpa adanya pelanggaran di dalamnya (International Federation of Human Rights et al., 2005).

Setelah ratifikasi UNCRC, negara tentu bekerja untuk mewujudkan komitmen internasionalnya dengan mengeluarkan undang-undang baru serta merubah beberapa peraturan undang-undang yang lain agar sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki situasi anak-anak Yaman dan memberikan mereka perawatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak mereka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yaman, kemudian mengeluarkan Undang-Undang Hak Anak No.45 Tahun 2002 yang berisikan mengenai kerangka hukum komprehensif mengenai hak-hak anak. Undang-Undang ini merupakan yang pertama dikeluarkan oleh Yaman dan berdasarkan UNCRC (Save The Children, 2011). Selain pembentukan UU, Pemerintah telah melaksanakan beberapa tindakan maupun program yang sesuai dengan komitmennya dengan PBB yaitu atas ratifikasinya UNCRC. Adapun beberapa pemenuhan hak anak korban perang di Yaman yaitu:

1) Pemulihan Sistem Kesehatan

Pemerintah Yaman telah menerapkan serangkaian tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dalam bidang kesehatan seperti memperkuat layanan darurat melalui penyediaan obat-obatan dengan lengkap, kamp kesehatan diperbanyak dan memperkuat kelembagaan di sektor kesehatan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan pada pelayanan dan petugas kesehatan (Child Right International Networks, 2014). Fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah telah meningkat dari 1.210 unit kesehatan (Save The Children, 2011) menjadi sekitar 2.700 posko kesehatan (Save The Children, 2011) dan terdapat 172 Rumah Sakit (Save The Children, 2011).

2) Peningkatan Kapasitas Air dan Lingkungan Bersih

Melalui *Yemen Emergency Crisis Project* (YECRP) yang merupakan proyek pembangunan dan pekerjaan umum di Yaman. Sejauh ini, YECRP telah mendukung

pembangunan 1.279 waduk (World Bank, 2022), 30.686 rumah tangga diberikan bak penampungan air hujan (World Bank, 2022) dan sebanyak 900.000 meter kubik air bersih telah disediakan (World Bank, 2022). Selain menyediakan air, proyek ini juga menjadi ladang lapangan kerja bagi penduduk setempat yang bekerja untuk membangun waduk.

Selain dari YECRP, pemerintah Yaman juga mulai melaksanakan proyek pengelolaan sumber daya air terpadu nasional. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan air guna mengurangi keterpurukan masyarakat dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar otoritas sumber daya air nasional saling bekerja sama secara sistematis dan menuju pengelolaan dan tata kelola air yang lebih baik lagi. Program dari pemerintah ini memiliki sebuah visi misi utama yaitu: peningkatan kapasitas air, penguatan kelembagaan pemerintah, perencanaan strategis, perencanaan tata kelola daerah aliran sungai serta memperbaiki tata kelola lingkungan.

Salah satu pencapaian penting dan utama dari pemerintah Yaman, melalui program-program ini adalah pemebentukan empat belas wilayah dengan perencanaan dan pengelolaan air yang memadai di wilayah yang dekat dengan aliran sungai yakni Hadramout, Sana'a, Sa'da, Taiz serta beberapa wilayah sungai yang dekat dengan pemukiman warga lainnya. Program ini dimulai dengan beberapa tahap persiapan oleh pemerintah. Dengan adanya pengelolaan sumber daya air, maka pemerintah sangat berharap bahwa kondisi kebersihan air dan sanitasi anak-anak akan membaik hingga penyebaran penyakit dapat berkurang (Kumar et al., 2015).

3) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Terkait bidang pendidikan, pemerintah dengan kementerian pendidikan telah bekerja sama dengan *Hayel Saaed Anam Group* (HAS) sebuah kelompok di Timur Tengah. Pada tahun 2019, pemerintah, kementerian dan HAS mendirikan dan mengelola "Sekolah Arab Modern Internasional" yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi, gratis dan adil bagi anak-anak yang sangat miskin di beberapa provinsi seperti Taiz, Aden dan Marib. Proyek ini berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan kesempatan belajar seumur hidup. Kemudian, proyek ini juga sudah sesuai dengan standar minimum pendidikan dalam keadaan darurat (OCHA Services, 2023).

4) Berkomitmen dalam Pengurangan Pengeksploitasian Anak

Guna mengurangi kekerasan pada anak-anak di Yaman pada masa perang, pemerintah mulai berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi pada tahun 2014 dengan melaksanakan kegiatan komite antar kementerian dan organisasi daerah mengenai perlindungan anak dengan kampanye melalui radio, tv maupun media sosial. Pada saat perang berlangsung, PBB telah menyatakan bahwa Houthi telah melakukan tindakan kekerasan dan perekrutan tentara anak. Terhitung sejak 2015, Houthi telah merekrut anak-anak yang sekolah, berasal dari keluarga miskin, dan anak-anak yang di doktrinisasi yang kemudian dijadikan angkatan bersenjata (Novianty, 2021). Namun

setelah pengadopsian UNCRC dan tingginya jumlah anak-anak yang cacat hingga terbunuh, maka pemerintah telah berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan dan penggunaan tentara anak secara berkelanjutan dan kelompok Houthi juga melaksanakan penandatanganan pada April 2022 untuk mengakhiri kekerasan dan perekrutan tentara anak (United Nations, 2022).

Selain dari pemerintah Yaman yang turut memberikan pemenuhan terhadap anak-anak korban perang di Yaman sesuai dengan implementasi UNCRC, negara tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti beberapa organisasi internasional. Tujuan dari organisasi internasional ini, dapat dipahami sebagai sebuah organisasi pelayanan manusia yang berusaha untuk membawa misi kemanusiaan dan misi sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat atas dasar nilai solidaritas, kedermawanan dan kebersamaan (Putri & Oktaviani, 2022). Organisasi internasional ikut turut andil dalam memberikan bantuan pemenuhan hak anak di Yaman dikarenakan negara sudah cukup sulit dalam menangani isu yang ada kemudian, mereka organisasi internasional ini juga bergerak sesuai dengan konvensi hak anak dalam memberikan bantuan pemenuhan hak anak.

Adapun beberapa organisasi internasional yang turut membantu pemenuhan hak-hak anak korban perang di Yaman yakni, United Nations Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO) dan World Food Programme (WFP). Adanya bantuan dari beberapa organisasi internasional ini, maka diharapkan mampu untuk membantu dan mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh seluruh anak-anak di Yaman, setidaknya mereka masih memiliki harapan untuk terus bertahan hidup ditengah kondisi perang.

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI UNCRC

Perang yang telah melanda Yaman, menyebabkan masyarakat terutama anak-anak menderita. Melihat kondisi anak-anak yang semakin memprihatinkan, Yaman kemudian berupaya untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak yang telah ditinggalkan sesuai dengan UNCRC yang telah mereka ratifikasi. Namun, dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa hambatan yang mengganggu proses bantuan terhadap anak-anak. Beberapa hambatan dalam pemenuhan hak anak, disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal.

1) Faktor Internal

Akibat perang saudara yang berkepanjangan, kehidupan anak-anak di Yaman semakin menderita. Yaman dikategorikan sebagai salah satu negara termiskin dan terkorup (Norjali, 2017). Dana bantuan yang diperoleh oleh pemerintah Yaman tidak di distribusikan dengan adil dan transparan. Korupsi yang merajalela di lembaga pemerintahan juga menjadi salah satu hambatan yang paling besar. Banyaknya pejabat pemerintah yang mengambil bantuan untuk anak-anak yang seharusnya menjadi hak mereka. Budaya korupsi sudah terjadi sejak pemerintahan Ali Abdullah Saleh, pada masa kepemimpinannya tidak ada sistem hukum yang jelas mengenai korupsi dan hal ini dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat.

Salah satu kasus korupsi yang menghambat pengimplementasian UNCRC terletak pada dana bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi untuk pemerintah Yaman guna memperkuat ketahanan pangan seperti beras, gula, susu, tepung yang dimaksudkan juga untuk menstabilkan harga domestik, dalam penyelidikan PBB telah ditemukan bahwa bank sentral Yaman telah melanggar aturan penggunaan mata uang asing dengan melakukan sebuah pencucian uang yang telah dipinjamkan oleh Arab Saudi. Keuntungan yang diperoleh sebanyak 423 juta dollar (Reuters, 2021), uang bantuan untuk rakyat dan anak-anak dipindahkan secara illegal ke perusahaan swasta.

Para penyelidik dari PBB telah menilai bahwa lembaga pemerintahan Yaman telah melakukan pencucian uang dan korupsi. Pada kasus ini, Terdapat beberapa lembaga pemerintah Yaman yang melakukan aksi pencucian uang dan korupsi. Pada kasus ini, diduga bahwa bank sentral serta pemerintah bekerja sama dengan pengusaha dan politisi guna menguntungkan mereka (Reuters, 2021). Hal ini menyebabkan buruknya pemenuhan hak-hak anak korban perang di Yaman sehingga pengimplementasian UNCRC sebagai sebuah aturan maupun norma sulit, banyak anak-anak hingga saat ini tidak memperoleh haknya.

2) Faktor Eksternal

Salah satu hambatannya eksternal yaitu, adanya kelompok Houthi maupun kelompok dari Arab Saudi yang kerap menghambat proses penyaluran distribusi kemanusiaan hingga mempersulit komoditas dagang untuk masyarakat umum. Salah satu kota di Yaman yakni Taiz, merupakan salah satu kota yang terdampak cukup parah dikarenakan aksi blockade ini, blockade militer di kota Taiz telah berlangsung sejak tahun 2015, blockade ini telah berlangsung selama tiga bulan pertama saat awal mula perang. Bantuan impor yang masuk ke Yaman hanya sebesar 15% dan ini terhitung cukup kecil dibandingkan dengan periode sebelum perang (Nugraha et al., 2022).

Pada saat ini, Yaman terus berupaya untuk memberikan pemenuhan terhadap hak anak yang dibantu oleh beberapa organisasi internasional. Walaupun terdapat beberapa hambatan didalamnya, Yaman tetap memiliki prioritas untuk terus memastikan program-program berjalan dengan baik sesuai norma dan kebijakan UNCRC. Dengan pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Abdrabbuh Mansur Hadi ke dewan kepemimpinan Yaman yakni, Rashad Al-Alimi diharapkan sebagai solusi politik akhir, agar masa perang dan pemberontakan Houthi segera berakhir (Coombs, 2022). Implementasi UNCRC sebagai sebuah rezim internasional di Yaman terhadap pemenuhan hak anak masih akan terus diupayakan, melihat kondisi perang yang masih berlangsung hingga saat ini, diharapkan dengan kepemimpinan yang baru, Houthi dapat menghentikan tindakan anarkis dan mengembalikan daerah-daerah yang telah dikuasai. Konflik yang telah usai akan memudahkan negara dalam memberikan pemenuhan terhadap anak secara optimal.

KESIMPULAN

Perang yang terjadi di Yaman telah menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak yang terjadi di Yaman yaitu: minimnya fasilitas kesehatan yang memadai, keterbatasan pangan yang berdampak pada malnutrisi, buruknya sistem sanitasi dan air bersih, hancurnya infrastruktur pendidikan dan maraknya eksploitasi pada anak saat perang melanda. Guna melindungi anak-anak dari korban perang, kemudian diratifikasinya UNCRC dan diharapkan mampu untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang telah mereka langgar.

Adapun dalam memberikan pemenuhan terhadap anak-anak, pemerintah Yaman telah bergerak dan bekerja sesuai dengan norma, kebijakan dan keputusan sesuai dengan UNCRC. Yaman telah membentuk sebuah Undang-Undang Hak Anak No.45 tahun 2002 yang telah disesuaikan dengan hukum internasional dan nasional, kemudian Yaman juga membentuk program-program untuk memenuhi seluruh hak anak yang telah terabaikan sebelumnya seperti dengan pemulihan sistem kesehatan, peningkatan kapasitas air dan lingkungan bersih, peningkatan kualitas pendidikan dan berkomitmen dalam pengurangan pengeksploitasian anak.

Selain dari pemerintahan Yaman, beberapa aktor non-negara seperti organisasi internasional di bawah naungan PBB yakni UNICEF, WHO dan WFP mereka memberikan bantuan atas dasar nilai solidaritas, kedermawanan dan kebersamaan. Organisasi internasional ini juga patuh terhadap norma UNCRC, yang kemudian bekerja sesuai dengan dengan norma dasar. Namun dalam upaya pemenuhan hak anak ini terdapat beberapa hambatan eksternal maupun internal dalam proses pendistribusian bantuan terhadap anak-anak. Hal ini kemudian menjadi sebuah tantangan bagi kepemimpinan saat ini untuk mengupayakan yang terbaik agar pengimplementasian dapat terdistribusi dengan baik ditengah kondisi negara yang cukup kacau.

REFERENCES

- Andrini, G. F. (2021). Krisis dalam Konflik : Keamanan Manusia Yaman semasa Perang Saudara 2015-2021. *ICMES*, 6(2), 99–124. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i2.137>
- AP News. (2011, February). *Timeline: Yemen war began in 2014 when Houthis seized Sanaa*. <https://apnews.com/article/joe-biden-saudi-arabia-ali-abdullah-saleh-united-arab-emirates-coronavirus-pandemic-7a1c185cbd6cfb815dfbf7c21df1c0e1>
- Astuti, D. P. (2019). Peran International Committee of the Red Cross (Icrc) Dalam Upaya Menangani Wabah Kolera Di. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(3), 1379–1394. <http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/cholera/outbreak-update-cholera-in-yemen->
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Child Right International Networks. (2014). *YEMEN: Children's Rights References in the Universal Periodic Review*. <https://archive.crin.org/en/library/publications/yemen-childrens-rights-references-universal-periodic-review-0.html>
- Coombs, C. (2022). *Presidential Council Replaces Hadi*. Sana'a Center for Strategic Studies. <https://sanaacenter.org/the-yemen-review/april-2022/17707>

- Eddyono, S. W. (2007). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Legal Development Facility. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/pengantar-konvensi-hak-anak/>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358. <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Journal of International Studies*, 3(2), 152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>
- Hidayat, S. (2022). *Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC Internatinal Committee of The Red Cross (ICRC) di Negara Yaman*. 117–123. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1018>
- ICRC. (2022). *Yemen: Conflict Leaves Millions of Children Without Proper Education*. ICRC. <https://www.icrc.org/en/document/yemen-conflict-leaves-millions-children-without-proper-education>
- International Federation of Human Rights, Yemen, C. S. O. in, & (SAF), S. A. F. for H. R. (2005). *Shadow Report on Children's Rights in Yemenn*. <https://www.refworld.org/docid/46f146ec0.html>
- Kumar, T. V., Rao, A. R., & Viswanatham, K. S. (2015). Water Resources Management - An Approach for Coping with Water Scarcity in ' Yemen .' *Journal of Chemistry and Chemical Sciences*, 5(May), 1–10. <http://chemistry-journal.org/download/T-Vinod-Kumar-A-Rajeshwar-Rao-and-K-S-Viswanatham/CHEMISTRY-JOURNAL-CHJV05I05P0275.pdf>
- Metekohy, O. (2021). *Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Ditengah Krisis Global Covid-19*. 1(9), 908–917. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/811>
- Nasser, A. (2023). *Child Soldiers in Yemen: Cannon Fodder for an Unnecessary War*. Arab Center Washington DC. <https://arabcenterdc.org/resource/child-soldiers-in-yemen-cannon-fodder-for-an-unnecessary-war/#:~:text=The majority of Yemen's child,when it comes to children.>
- Norjali, N. R. (2017). Hambatan United Nations International Children ' S Emergency Fund (Unicef) Dalam Menangani Kelaparan Di Yaman Tahun 2011-2016. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 861–874.
- Novianty, R. (2021). *Tanggung Jawab Houthi yang Melakukan Perekrutan Anak sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Internasional*. 7(2), 623–627. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/27366>
- Nugraha, F. A., Sari, D. S., & Mubarak, K. Z. (2022). *Bantuan Kemanusiaan UNICEF terhadap Anak-Anak terdampak Kelaparan dan Malnutrisi dalam Konflik Yaman Abstrak*. 6(1), 32–49. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/5432>
- OCHA Services. (2023a). *A lifeline in Yemen: Private Sector Support to Education in a time of Crisis*. Reliefweb. <https://reliefweb.int/report/yemen/lifeline-yemen-private-sector-support-education-time-crisis>
- OCHA Services. (2023b). *Yemen – Children and armed conflict (DG ECHO, UN, media) (ECHO Daily Flash of 30 June 2023)*. Reliefweb. <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-children-and-armed-conflict-dg-echo-un-media-echo-daily-flash-30-june-2023#:~:text=Grave>

- violations included recruitment of, hospitals%2C and abduction of children.
- OHCHR. (2002). *Convention on The Right of The Child*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>
- Putri, N. A. R., & Oktaviani, V. (2022). Upaya Organisasi Internasional dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Yaman. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 161–169. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>
- Rahman, R. F., & Munabari, F. W. F. (2017). Perubahan Sikap Masyarakat Yaman Terhadap Intervensi Dewan Kerjasama Teluk dalam Menangani Krisis di Yaman Pasca Kudeta Al-Houthi Pada Tahun 2014-2016. *Balcony*, 1(1), 92–99. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/203>
- Reuters. (2021). *Yemen Government Appoints Ernst & Young to Audit Central Bank - Statement*. <https://www.reuters.com/article/yemen-security-cenbank-int-idUSKBN2A70F8>
- Rizki, K., Zulhandayani, K., Wahyudin, Y. ., & Rustam, I. (2022). Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan di Kota Mataram. *Resiprokal*, 4(1), 94–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.135>
- Rosyidin, M. (2018). *Buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh*. Deepublish.
- Save The Children. (2011). *Country Profile of Yemen A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child*. Save The Children. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/country-profile-yemen-review-implementation-un-convention-rights-child-2011/>
- Save The Children. (2021). *2.3 Million Children Are on the Brink of Starvation in Yemen*. Save The Children. <https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/yemen-severe-acute-malnutrition>
- Shang, M., & Zhang, Y. (2022). Cholera prevention and management in Yemen. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 8, 529–534. <https://doi.org/10.54097/hset.v8i.1211>
- UNICEF. (n.d.). *What is the Convention on the Rights of the Child?* UNICEF for Every Child.
- UNICEF. (2017). *Unprecedented Spread of Cholera in Yemen as Health Workers Race Against Time to Save Children*. UNICEF for Every Child. <https://www.unicef.org/press-releases/unprecedented-spread-cholera-yemen-health-workers-race-against-time-save-children>
- UNICEF. (2022). *More than 11,000 children killed or injured in Yemen*. UNICEF for Every Child. <https://www.unicef.org/press-releases/more-11000-children-killed-or-injured-yemen#:~:text=11%2C019 children have been either,events or on the checkpoints>
- UNICEF. (2023a). *Yemen Crisis*. UNICEF for Every Child. <https://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis>
- UNICEF. (2023b). *Yemen Crisis*. UNICEF for Every Child. <https://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis#:~:text=Yemen remains one of the,more forms of humanitarian assistance.>
- United Nations. (n.d.). *The United Nations in Yemen*. United Nations Yemen. Retrieved July 28, 2023, from <https://yemen.un.org/en/about/about-the-un>
- United Nations. (1989). *Convention on The Right of The Child*. United Nations Treaty Collection. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en#21
- United Nations. (2022). *Yemen Children and Armed Conflict*. United Nations.

<https://childrenandarmedconflict.un.org/where-we-work/yemen/>

- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 124–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28778>
- World Bank. (2016). *Education in Yemen Struggles after More than a Year of Conflict*. World Bank. <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/education-yemen-struggles-conflict>
- World Bank. (2021). *Health Sectors In Yemen*. World Bank. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8aca65c4db5338cd3a408c0d4a147123-0280012021/original/Yemen-Health-Policy-Note-Sep2021>
- World Bank. (2022). *Rainwater Harvesting in Yemen: A Durable Solution for Water Scarcity*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/08/23/rainwater-harvesting-in-yemen-a-durable-solution-for-water-scarcity#:~:text=The project aimed to enhance,cubic meters of clean water>
- World Health Organization. (2021). *Acute Malnutrition Threatens Half of Children Under Five in Yemen in 2021: UN*. Joint News Release. <https://www.who.int/news/item/12-02-2021-acute-malnutrition-threatens-half-of-children-under-five-in-yemen-in-2021-un#:~:text=Nearly 2.3 million children under,do not receive urgent treatment.>